

**PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KEUANGAN KODAM I BUKIT
BARISAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKTUR KEUANGAN
ANGKATAN DARAT NO.
SKEP/92/X/2004**

SKRIPSI

**Ditujukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YENI TRI SUSANTI

NPM : 03 840 0131

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI
KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
KUDAM I/BUKIT BARISAN DITINJAU DAR
KEPUTUSAN DIREKTUR KEUANGAN ANGKATAN
DARAT NO. SKEP/92/SX/2004

PENULIS :

N A M A : YENI TRI SUSANTI
N I M : 03 840 0131
B I D A N G : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

ZAMZAMI, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II

ARIF, SH, MH.

DISETUJUI OLEH :

KETUA BIDANG HKM ADM NEGARA
FAK. HUKUM - UMA

(ZAMZAMI, SH, MH.)



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KEUANGAN KODAM I BUKIT BARISAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKTUR KEUANGAN ANGKATAN DARAT NO. SKEP/92/XI/2004

PENULIS :

**N A M A : YENI TRI SUSANT
N I M : 03 840 0131
B I D A N G : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

ZAMZAMI, SH, MH.

ARIF, SH, MH.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. KETUA : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.**
- 2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH**
- 3. PENGUJI I : ZAMZAMI, SH, MH.**
- 4. PENGUJI II : ARIF, SH, MH.**

TANDA TANGAN

(Handwritten signatures of the green table exam committee members)

D SETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG HKM ADM NEGARA
FAK. HUKUM - UMA**

**DEKAN
FAK. HUKUM - UMA**

(ZAMZAMI, SH, MH.)

{SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.}

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan. Skripsi penulis ini adalah merupakan rangkaian kewajiban-kewajiban penulis di dalam perkuliahan terutama untuk mencapai ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara.

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah "PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KEUANGAN KODAM I BUKIT BARISAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKTUR KEUANGAN ANGKATAN DARAT NO. SKEP/92/X/2004".

Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

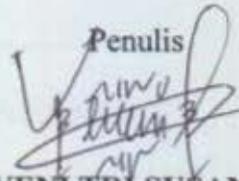
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Arif, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kakudam I Bukit Barisan beserta staf dan rekan sekerja dimana penulis

melakukan penelitian.

- Bapak dan Ibu serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Civitas akademika serta rekan-rekan se-almamater.
- Khusus kepada keluarga tercinta Ayahanda Pamujiono dan Ibunda Dasiah yang telah memberikan dorongan dan semangat, bantuan baik moril maupun material, sehingga penulis merasa yakin dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Atas segala bantuan dari semua pihak yang turut membantu dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya, semoga amal ikhlas mereka semua dapat pahala yang berlipat ganda. Akhimya besar harapan penulis, temuan yang kecil ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dan khususnya dalam bidang keolahragaan secara umum dan pembinaan kekuatan otot tungkai dan kelentukan secara khususnya. Amin
Ya Robbal 'alamin.

Medan, Agustus 2007

Penulis

YENI TRI SUSANTI
NIRM : 03 840 0131

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	11
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	11
B. Aktivitas dan Fungsi Hukum Administrasi Negara.....	19
C. Pengertian Administrasi Keuangan	23
D. Pelaksanaan Administrasi Keuangan.....	31
E. Pentingnya Administrasi Keuangan.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TENTARA NASIONAL	35
A. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	35
B. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional.....	37

C.	Landasan Hukum Tentara Nasional Indonesia.....	49
D.	Disiplin Prajurit TNI.....	50
BAB IV.	PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI	
	KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI KUDAM I BUKIT	
	BARISAN.....	55
A.	Gambaran Umum Tentang Kudam I Bukit Barisan.....	55
B.	Mekanisme Kerja Administrasi Keuangan Pada Kudam I Bukit Barisan.....	58
C.	Personal Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kudam I Bukit Barisan.....	67
D.	Hubungan Administrasi Keuangan Dengan Hukum Administrasi Negara.....	70
E.	Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Usaha Mengatasinya.....	74
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, keuangan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan cukup penting dalam melaksanakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu masalah keuangan ini membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terhambat. Dana-dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Masalah keuangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini telah mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dan perundang-undangan ini antara lain mencakup sistem perencanaan, pemanfaatan dan juga tanggung-jawab. Jika aturan dan perundang-undangan ini diabaikan maka dapat dipastikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan tidak akan tercapai.

Suatu unsur penting yang dipakai dalam menjaga kelancaran pengelolaan keuangan ini adalah administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini dimiliki oleh semua unsur atau badan yang terkait dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Baik instansi negeri maupun swasta, pada instansi negeri, administrasi keuangan ini biasanya disebut dengan administrasi keuangan negara. Administrasi keuangan ini harus dikelola dengan baik karena dana yang akan dimanfaatkan untuk

kepentingan orang banyak. Pengelolaan keuangan ini mencakup kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengawasan serta masalah-masalah keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku inilah yang dikatakan dengan kegiatan administrasi keuangan negara.

Salah satu lembaga yang tidak terlepas dari penerapan administrasi keuangan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI adalah sebuah lembaga bela negara dimana organisasi dan tata kerjanya memiliki spesifikasi tugas dan juga bertugas dalam rangka pertahanan negara. Hal ini senada dengan isi Pasal 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penyelenggaraan administrasi keuangan di lingkungan TNI Kodam I Bukit Barisan diselenggarakan oleh sebuah badan yang bertanggung jawab secara terstruktur kepada Panglima Kodam I Bukit Barisan yaitu oleh Bagian Keuangan Daerah Militer (Kudam) I Bukit Barisan.

Sedangkan yang melandasi pekerjaan administrasi keuangan dari Keuangan Daerah Militer Kodam I Bukit Barisan adalah Surat Keputusan Direktur Keuangan Angkatan Darat No. SKEP/92/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan.

Dalam administrasi keuangan terdapat beberapa masalah penting yakni : Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntansi, laporan dan pengawasan di satu pihak dan penggunaan dana di pihak lain. Demikian juga halnya dengan Kudam I Bukit Barisan sebagai sebuah alat yang melakukan pengelolaan administrasi keuangan Kodam I Bukit Barisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Bintoro Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2000.
- Danuredjo, *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djoefri Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 2004.
- Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 2004.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Prajudi Admosoedjono, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soewarno Handayangirat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1999.